

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG**

*Diajukan guna memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum*

Oleh

**BENNY YOKA PUTRA
05140199**

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
(Benny Yoka Putra, 05140199, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68
halaman, 2010)**

ABSTRAK

Pegawai negeri sipil (PNS) sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan atau peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Demi terciptanya keseragaman PNS di Indonesia serta untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian diperlukan pengadaan PNS yang baik dan benar, terutama di daerah. Agar didapat PNS yang berkualitas dan profesional. Sejak era otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999), pelaksanaan manajemen PNS di daerah menjadi kewenangan daerah masing-masing, namun keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat pemerintah pusat menarik kembali sebagian kewenangannya yang sebelumnya diserahkan kepada daerah akibat adanya penafsiran yang salah oleh pemerintah daerah menerjemahkan pemberian otonomi. Dalam pelaksanaan pengadaan PNS saat ini banyak terdapat permasalahan. Untuk itu penulis tertarik membahas bagaimana pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil daerah dan kendala apa saja yang dialami serta upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Sosiologis sehingga data yang dipergunakan data primer yang bersifat semi terstruktur. Pembahasan dalam skripsi adalah Pelaksanaan Pengadaan PNS Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang dan kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengadaan PNS Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang dan upaya penyelesaiannya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pelaksanaan Pengadaan PNS Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengadaan PNS Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang, antara lain dalam masalah anggaran yang masih menanggung semua gaji PNS, serta tidak tersedianya kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi yang diminta serta terdapat ketidakjelasan, dimana banyak dari Universitas Swasta tidak mencantumkan akreditasi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), sehingga membuat banyak pelamar dinyatakan tidak lulus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan atau Peraturan Pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi dan kewajiban PNS. Dengan adanya pergeseran paradigma dalam pelayanan publik, secara otomatis hal tersebut akan menciptakan perubahan sistem dalam Hukum Kepegawaian dengan adanya penyesuaian–penyesuaian dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban PNS yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintah, sistem dan penataan manajemen kepegawaian.¹

Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dimungkinkan akan berdampak pada sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam bidang kelembagaan, adalah menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistis (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif serta efisien yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Hal ini menuntut pula pada penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya pelayan prima bagi masyarakat. Di bidang ketatalaksanaan, tantangan yang dihadapi adalah kualitas untuk transparansi pelayanan masyarakat yang kurang adaptif terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat, oleh karena itu diperlukan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan

¹ Sri Hartini, 2007, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 3

dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan di daerah.

Bidang sumber daya manusia sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintah menghadapi tantangan untuk dapat mengembangkan sistem perencanaan sumber daya manusia aparatur pemerintah sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Konsekuensinya adalah pembentukan disiplin, etika dan moral ditingkat pelaksana yaitu PNS yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan tuntutan terhadap perwujudan aparatur pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan lebih profesional.²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian merupakan penataan manajemen kepegawaian yang seragam melalui penetapan norma, standar dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian. Dengan adanya keseragaman tersebut diharapkan dapat menciptakan kualitas PNS yang seragam di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, manajemen PNS tidak lagi menggunakan sistem sentralisasi seperti dalam pelaksanaan manajemen pada era Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Sejak era otonomi daerah dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pelaksanaan manajemen PNS di daerah menjadi wewenang daerah masing-masing. Namun, lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membuat pemerintah pusat menarik kembali sebagian

² Miftah Thoha, 2005, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hlm 3-4.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Padang, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Dimana pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, "pengadaan pegawai negeri sipil dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil sampai dengan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil". Ketentuan diatas dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pelaksanaanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Yang berwenang melakukan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah, dengan memperhatikan penetapan formasi dari Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hartini, Sri, 2007, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 1986, *Dimensi – Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta
- Thoha, Miftah, 2005, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Satoto, Sukamto, 2004, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, HK Offset, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 1979, *Pokok – Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Prandya Paramita, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.;
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Musanef, 1989, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Muchsan, 1982, *Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil*, Liberty, Yogyakarta.
- Djarmika, Sastra dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.